



**Faktor Domestik di Balik Kerjasama Ekonomi: Kebijakan Jepang terhadap Indonesia dalam Skema *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)* 2008 – 2018**

**Dian Islamawati**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip.undip.ac.id](mailto:fisip.undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*The end of Japanese occupation during World War II made Japan finally provide war compensation assistance to its former colonies, including Indonesia, known as Japan ODA assistance. Over time, this assistance was also used by Japan as a means of maintaining good relations between Japan and Indonesia. After the ODA assistance took place for 50 years (1958-2008), then in 2008 Japan and Indonesia entered into bilateral economic cooperation through the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) scheme. However, the cooperation that has been carried out for 10 years (2008-2018) has resulted an imbalance because the economic benefits were dominated by the Japanese, while the benefits gained by Indonesia were not significant. In addition to the economy, Japanese policy in the IJ-EPA is also used to dominate other fields. This research then aims to analyze the reasons why Japan is willing to conduct bilateral economic cooperation with Indonesia. There are domestic factors behind Japan cooperating with Indonesia through the IJ-EPA scheme. These factors will be analyzed using the concept of national interest and nation branding. This study argues that the IJ-EPA cooperation between Japan and Indonesia in the end only benefited the Japanese. Because besides dominating profits in the economic field, the IJ-EPA collaboration was also used by Japan to maintain its dominance in Southeast Asia.*

*Keywords: Japan, Indonesia, IJ-EPA, National Interest, Nation Branding*

**PENDAHULUAN**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dimensi politik Jepang dalam kerjasama ekonomi bilateral Jepang dengan Indonesia dalam skema *Economic Partnership Agreement (EPA)*. EPA merupakan sebuah kerangka kerjasama ekonomi yang berbasis pada konsep *Free Trade Agreement (FTA)*. Jepang melakukan kesepakatan EPA ini ke negara-negara di Asia Tenggara, dan Indonesia merupakan salah satu yang menjadi mitranya. Kerjasama EPA dengan Indonesia dikenal dengan istilah *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)*. Sebelum kerjasama IJ-EPA dicanangkan, selama 50 tahun sebelumnya (1958-2008) Jepang telah memberikan bantuan ODA (*Official Development Assistance*) sebagai bantuan ganti rugi perang karena Jepang sempat menjajah Indonesia.

Adanya hubungan yang telah berlangsung lama inilah yang akhirnya membuat kedua negara menyepakati perjanjian kerjasama lebih lanjut dalam skema IJ-EPA.

Kesepakatan kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia-Jepang ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral resmi yang pertama bagi Indonesia. Kerjasama IJ-EPA ini ditandatangani pada tanggal 20 agustus 2007 oleh mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2008 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2014). Dalam perjanjian ini, kedua negara banyak menyepakati hal-hal perekonomian, seperti perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, Hak Kekayaan Intelektual, dan sumber daya energi dan mineral. Perjanjian ini juga mencakup 11 kelompok perundingan (Jurnal Hukum Internasional Indonesia 2008). Namun, seperti yang disampaikan M.S Hidayat saat menjabat sebagai menteri perindustrian Indonesia, bahwa Indonesia tidak mendapat keuntungan yang signifikan atas kerjasama ekonomi dengan Jepang dalam kerangka IJ-EPA yang diimplementasikan sejak tahun 2008 tersebut. Ia juga menambahkan bahwa selama lima tahun pertama, program tersebut tidak memberikan hasil optimal. Dari 13 industri yang menjadi fokus, hanya lima sektor yang implementasinya cukup baik (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia 2013). Tampaknya perekonomian bukanlah menjadi satu-satunya fokus Jepang dalam kerjasama IJ-EPA.

Pertanyaannya kemudian adalah: Mengapa Jepang bersedia untuk melakukan kerja sama ekonomi dengan Indonesia melalui skema *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJ-EPA)? Penulis bermaksud mengkaji tentang kerjasama IJ-EPA dari segi politik. Penelitian tentang dimensi politik dalam kerjasama ekonomi penting dilakukan karena dalam kerjasama ekonomi tidak hanya memberi efek positif saja, tetapi juga bisa memberikan efek negatif, contohnya seperti terjadinya penipuan (*fraud*), kasus pencucian uang (*money laundry*), atau juga adanya kepentingan-kepentingan politik lainnya di luar kepentingan ekonomi itu sendiri. Maka tulisan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor politik di balik kerja sama ekonomi IJ-EPA yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, tulisan ini akan memakai konsep kepentingan nasional (*national interest*) yang merupakan turunan dari perspektif realis. Realis menyadari bahwa keinginan manusia itu besar dan beragam, mereka mengedepankan aspek keegoisan dan aspek dasar manusia lainnya untuk melakukan diplomasi. Diplomasi digunakan sebagai jalan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

Penelitian ini berargumen bahwa kerjasama IJ-EPA antara Jepang dan Indonesia pada akhirnya hanya menguntungkan pihak Jepang saja. Jepang menggunakan media kerja sama IJ-EPA untuk mencapai kepentingan nasionalnya yaitu mendapatkan citra baik, yang nantinya akan diteruskan oleh Jepang untuk menjaga dominasinya di Asia Tenggara.

## PEMBAHASAN

### *Kepentingan Nasional sebagai Sebuah Teori*

Penelitian ini dianalisis menggunakan konsep kepentingan nasional yang merupakan turunan dari teori realisme. Realisme dengan konsep kepentingan nasional digunakan penulis untuk melihat adanya motif politik yang melatarbelakangi Jepang dalam melakukan kerja sama ekonomi bilateral dengan Indonesia. Holsti (1996) membagi kepentingan nasional menjadi 3 bentuk, yaitu *core values*, *middle range objectives*, dan *long range objectives*. Bentuk pertama *Core values*, yaitu nilai dasar atau nilai inti sebagai suatu macam tujuan, dimana aktor-aktor akan melakukan segala macam pengorbanan demi tercapainya nilai dasar

pada suatu negara, seperti menjamin atau mempertahankan kedaulatan negara untuk mempertahankan suatu sistem sosial, politik, dan ekonomi pada suatu wilayah. Bentuk kedua *Middle range objectives*, yaitu kepentingan nasional dengan memperhitungkan aktivitas politik, ekonomi, maupun budaya guna mampu memperhitungkan tercapainya kepentingan suatu negara, seperti mencari peluang dalam pembangunan ekonomi negara yang dituju. Tujuan yang dapat dicapai dalam kepentingan jangka menengah ini meliputi kerjasama internasional, *prestise*, dan perlindungan kepentingan. Tujuan-tujuan ini dapat diimplementasikan ke dalam 3 macam: pertama ialah *interest of preasure group*, keberadaan kelompok pendorong ini mampu untuk memberikan pengaruh yang signifikan dalam tercapainya kepentingan nasional. Kedua, *non-political cooperation*, demi tercapainya suatu kepentingan nasional negara maka dibutuhkan kerjasama yang sifatnya non politik seperti memberikan bantuan untuk negara yang sedang membutuhkan demi tetap terjaganya suatu hubungan. Ketiga ialah *Promotion of national prestige*, tujuan dari elemen ini ialah menciptakan suatu citra mengesankan di negara-negara di luar negeri melalui propaganda melalui media masa demi tercapainya citra baik yang diinginkan. Selanjutnya, kepentingan nasional bentuk ketiga ialah *Long range objectives*, yaitu kepentingan nasional yang bersifat ideal dan memiliki dampak jangka panjang, seperti membentuk organisasi-organisasi dalam sistem internasional dan mengatur peranan negara di dalamnya.

Penelitian ini berargumen bahwa Jepang dalam melakukan kerjasama IJ-EPA, didasari atas kepentingan nasionalnya untuk mendapatkan citra baik dari negara yang pernah dijajahnya, yaitu Indonesia. Kepentingan Jepang di Indonesia ini dapat didefinisikan ke dalam kepentingan nasional bentuk *middle range objectives*. Kepentingan nasional Jepang dalam pemberian bantuan ODA ke Indonesia merupakan implementasi dari *non-political cooperation*, yaitu Jepang memberikan bantuan ODA untuk menjaga hubungannya dengan Indonesia. Sedangkan kerjasama IJ-EPA merupakan implementasi dari *promotion of national prestige*, yaitu bantuan ODA yang telah dilancarkan selama 50 tahun dilanjutkan dengan menjalin kerjasama ekonomi bilateral melalui skema IJ-EPA.

#### *Kepentingan Jepang untuk Membangun Citra Baik di Indonesia*

Dari tahun 1958 Jepang konsisten memberikan bantuan ODA agar hubungannya dengan Indonesia tetap terjaga. Hingga kemudian setelah bantuan ODA diberikan selama 50 tahun di Indonesia, pada tahun 2008 Jepang semakin mengeratkan hubungannya dengan Indonesia yang diwujudkan dengan melakukan kerjasama IJ-EPA. Usaha Jepang ini dimaksudkan Jepang untuk menciptakan citra baiknya di Indonesia. Kepentingan mendapat citra baik melalui kerjasama IJ-EPA tersebut termasuk dalam konsep kepentingan nasional bentuk *Middle Range Objectives* dan merupakan implementasi dari model ketiga dari bentuk tersebut, yaitu *promotion of national prestige*, kerjasama dilakukan demi tercapainya citra baik yang diinginkan.

Sebagai negara yang kalah pada Perang dunia II, Jepang tidak ingin berlarut-larut dicap sebagai negara yang memiliki citra buruk di mata internasional. Oleh karena itu, Jepang kemudian beraksi untuk memperbaiki citranya di tataran global. Sejak tahun 1954 hingga sekarang, Jepang tetap berusaha menyalurkan bantuan luar negerinya. Melalui ODA, Jepang berusaha untuk tetap memberikan kontribusi kepada negara-negara bekas jajahnya (Ryantori, 2014).

Di Indonesia, Jepang berkontribusi di bidang infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan alih teknologi. Bantuan ODA yang diberikan Jepang ke Indonesia adalah

jalan yang ditempuh Jepang untuk mendapatkan simpati, sehingga hubungan baik dengan Indonesia tetap terjaga. Ketika hubungan baik tetap bisa terjaga, maka kemudian kerjasama bilateral ekonomi IJ-EPA digunakan sebagai media untuk mendapatkan citra baik Jepang di Indonesia. Dari kerjasama IJ-EPA ini nantinya citra baik Jepang di Indonesia terbentuk. *Soft power* adalah kunci bagi Jepang dalam membangun citranya di luar negeri secara global. *Soft power* bagi Jepang menggambarkan kemampuan untuk mempengaruhi dan menarik negara lain secara non-koersi. Melalui program ODA, Jepang berusaha membentuk citra positif sebagai negara berkekuatan ekonomi besar yang dermawan (Arase, 1995, p. 226).

Pemberian bantuan luar negeri dilihat sebagai alat kebijakan luar negeri untuk menghimpun dukungan dari negara penerima bantuan yang memiliki peranan penting bagi Jepang. Kebijakan ODA yang tercantum dalam *ODA Charter*, kini ditekankan untuk turut berkontribusi dalam upaya penciptaan stabilitas dan perdamaian dunia, sekaligus memastikan keamanan dan kepentingan Jepang di masa datang. Pemberian ODA kemudian dilihat sebagai kebijakan yang tepat untuk meraih simpati dan dukungan dari masyarakat internasional terhadap posisi Jepang (MOFA, 2003). IJ-EPA sebagai perjanjian kerja sama ekonomi dengan Indonesia membuat Jepang tetap bisa mempertahankan posisi emasnya di Indonesia, baik sebagai negara investor terbesar, negara yang membantu, dan juga negara yang bekerjasama secara bilateral yang pertama kali bagi Indonesia. Investasi Jepang di bidang infrastruktur dan teknologi sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Bagi Indonesia, Jepang adalah sumber utama pinjaman, bantuan, dan pengembangan untuk negaranya (Kementerian Perdagangan RI, 2007). Dari kerjasama IJ-EPA, investasi Jepang dalam berbagai bidang di dalam negeri telah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi tenaga Indonesia sebesar 4,7 juta jiwa dan investasi tersebut menyumbang 6,1 persen PDB Indonesia (Fitriyanti, 2018).

Kerjasama Indonesia-Jepang telah berlangsung lama terutama dalam bidang infrastruktur. Bukti bahwa Jepang telah mendapatkan citra baik dari Indonesia sejak adanya IJ-EPA yaitu kebutuhan infrastruktur dari Jepang ke Indonesia tidak hanya semakin kuat namun juga semakin luas. Kini Jepang telah dipercaya oleh pemerintah Indonesia atas kontribusinya dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Pada periode awal sebelum IJ-EPA diberlakukan, kerja sama lebih banyak pada pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan, namun kini setelah IJ-EPA diberlakukan, kerjasama infrastruktur berkembang ke sektor jalan tol, sanitasi, dan perumahan. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Danis H Sumadilaga mengatakan, “kerja sama dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat pada hadirnya infrastruktur fisik semata, namun juga memberikan manfaat bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, alih teknologi, dan lahirnya institusi baru” (Tribun News, 2019).

Seperti halnya kerja sama pembangunan beberapa bendungan di Jawa Timur, berkontribusi mengembangkan sumber daya manusia yaitu meningkatkan kemampuan lulusan sarjana Indonesia serta turut berpengaruh pada lahirnya Perum Jasa Tirta 1 yang mengelola Daerah Aliran Sungai Brantas dan berdirinya PT. Indra Karya, BUMN jasa konsultasi bidang sumber daya air. Kerja sama spesifik lainnya yaitu dalam hal pembangunan Sabo Dam untuk menahan aliran banjir lahar erupsi gunung berapi. Melalui kerja sama tersebut, Indonesia telah memiliki ahli Sabo dan telah dibentuk Balai Sabo di Yogyakarta sebagai pusat riset dan pengembangan teknologi Sabo. Setelah kerja sama IJ-EPA terjalin, permintaan kebutuhan pembangunan infrastruktur dari Jepang ke Indonesia semakin meningkat. Salah satunya yaitu pada sektor jalan tol yakni pembangunan Tol Akses

Pelabuhan Tanjung Priok yang telah terselesaikan pada tahun 2017, Tol Akses Pelabuhan Patimban di Subang, dan Tol Padang-Pekanbaru Seksi II Sicincin-Payakumbuh sepanjang 78 km. Pada ruas tersebut terdapat pembangunan lima terowongan yang akan menjadi terowongan terpanjang di Indonesia, dengan total panjang 8,9 km yang menembus Bukit Barisan. Kerja sama lainnya pasca IJ-EPA diimplementasikan lebih luas yaitu tampak pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.1** Kerjasama Pembangunan Infrastruktur Jepang di Indonesia

Sebelum IJ-EPA diberlakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pembangunan Bendungan: Selorejo, Lahor, Wlingi, dan Karangates.</li> <li>•Pembangunan Sabo Dam untuk menahan banjir lahar erupsi Gunung Merapi di Yogyakarta.</li> </ul>
Setelah IJ-EPA diberlakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Pengembangan Pembangunan Sabo Dam di Yogyakarta.</li> <li>•Pengembangan pelabuhan Patimban di Subang sebagai pelabuhan logistik bertaraf internasional.</li> <li>•Pembangunan terowongan pada proyek tol Padang-Pekanbaru.</li> <li>•Pembangunan Tol Padang-Bukit Tinggi-Pekanbaru</li> <li>•Pembangunan berkelanjutan proyek kereta <i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta.</li> <li>•Pembangunan dan pengembangan pulau-pulau terluar Indonesia: Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, dan Biak.</li> <li>•Membangun pelabuhan dan pasar ikan dan pembangunan kapal angkut ikan dari pulau terluar ke pelabuhan utama.</li> <li>•Pembangunan proyek kereta kencang atau semi cepat Jakarta-Surabaya.</li> <li>•Pembangunan <i>Jakarta Sewerage System</i> (JSS) untuk pengelolaan air limbah di Jakarta.</li> <li>•Pembangunan Pembangkit listrik.</li> <li>•Pembangunan Institusi.</li> <li>•Pembangunan Perumahan.</li> </ul>

**Sumber:** *Detik Finance* (2018)

Jepang berpengalaman dalam pembangunan infrastruktur di dalam negerinya, sehingga selain menguatnya permintaan kebutuhan infrastruktur Jepang di Indonesia, Indonesia juga mengharapkan adanya alih pengetahuan dan meningkatkan permintaan transfer teknologi dari Jepang ke Indonesia (Tribun News, 2019).

Dalam kesempatan wawancara kepada presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Ilham Malik sebagai peneliti *Center for Urban and Regional Studies* Universitas Budi Luhur pada tahun 2017, presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pertanyaan mengenai kunjungan Shinzo Abe yang ke Indonesia pada tahun 2014. Jokowi mengatakan, “Jepang sudah sangat lama menancapkan pengaruhnya di Indonesia, terutama di bidang infrastruktur dan investasi. Melalui beragam instrumen lembaga, Jepang berupaya menjadikan Indonesia sebagai sahabat bagi perekonomian sekaligus menjadi mitra politik dalam level internasional” (Malik, 2014). Sambutan hangat oleh Jokowi tersebut menandakan bahwa Jepang yang

sempat memiliki citra buruk pada saat Perang Dunia II, kini sudah mendapatkan citra yang baik di Indonesia. Usahnya yang dilakukan selama lebih kurang 60 tahun (1948-2008) sedikit demi sedikit membuahkan hasil karena telah memberikan bantuan pada negara korban perang. Pada dasarnya tujuan dari pemberian bantuan ODA yang dilanjutkan dengan kerja sama IJ-EPA bukan hanya semata-mata memberikan bantuan dan bekerja sama saja, tetapi Jepang juga ingin menunjukkan pada negara-negara di Asia Tenggara bahwa posisi atau keadaan Jepang pada masa kini telah berbeda dan berubah dari keadaan Jepang di masa Perang Dunia II.

### *Menjaga Dominasi Jepang di Asia Tenggara*

Dahulu pada masa Perang Dunia II ketika Jepang menginvasi Asia Tenggara di akhir tahun 1941, Indonesia adalah negara yang menjadi target utamanya. Hal tersebut karena Jepang sangat membutuhkan pasokan minyak bumi dan bahan mentah lainnya yang dapat diperoleh dari sumbernya yaitu di Indonesia. Berdasarkan telegram yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Jepang pada tahun 1940, Jepang menyebut Indonesia sebagai "*the supreme treasure-house of the world*" (Goto, 1997). Maka Jepang sempat menguasai sumber daya alam Indonesia pada saat Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942-1945. Pasca penjajahannya, Jepang berusaha untuk tetap dekat dengan pemilik sumber kekayaan alam tersebut. Hal itulah yang membuat Indonesia menjadi penerima ODA terbesar dari Jepang di Asia Tenggara, karena Indonesia adalah inti Asia Tenggara.

Jepang memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara, baik kebrutalan militernya saat menjajah wilayah tersebut pada masa Perang Dunia II, bantuan ganti rugi perang (ODA) pada masa pasca perang, hingga upayanya kini untuk membangun interaksi ekonomi yang modern dengan negara-negara di wilayah tersebut. Jepang telah memainkan peran utama dalam membentuk pembangunan politik dan ekonomi di Asia Tenggara. Ia terus menyumbang dana dan investasi untuk kegiatan ekonomi. Meskipun Jepang sempat kalah pada masa Perang Dunia II dan perekonomiannya hancur pada saat itu, tapi Jepang cepat bangkit dan kini memiliki pengaruh besar di bidang ekonomi (Beeson, 2001). Pada tahun 1977, Perdana Menteri Takeo Fukuda meyakinkan ASEAN bahwa Jepang akan bertindak sebagai mitra yang setara dan membantu mempromosikan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik di seluruh Kawasan (Kratoska, 2011). Bantuan dana pembangunan dari Jepang 64% untuk negara-negara berkembang di Asia Tenggara (Sneider, 1989).

Seorang ekonom Thailand, Twatchai Yongkittikul, mengatakan bahwa "*Japan is the most important player in Shoutheast Asia*" (Sneider, 1989). Jepang membiayai proyek-proyek industri ASEAN untuk bergerak ke industri yang lebih maju. Pinjaman yang diberikan bergantung pada kelayakan masing-masing proyek. Adapun di antaranya proyek pabrik soda di Thailand, pabrik fosfat di Filipina, dan pabrik mesin diesel di Singapura. Untuk Indonesia dan Malaysia, bantuan Jepang telah mendorong pengembangan industri kayu, aluminium, dan pabrik urea. Untuk negara-negara seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja masih berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti sistem transportasi atau pembangkit tenaga listrik. Pada abad-20 Perekonomian Jepang menjulang tinggi di hadapan negara-negara tetangganya baik di Asia Timur maupun Asia Tenggara. Jepang eksis menjadi negara yang mendominasi ekonomi di ASEAN.

Hingga suatu hari Cina hadir sebagai negara kekuatan besar yang muncul di ASEAN, yang menjadikan bergesernya kekuatan Jepang sebagai negara yang sangat penting untuk ASEAN. Hal ini menjadi permasalahan untuk pemerintah Jepang terutama dalam hal

perdagangan, karena dengan munculnya negara-negara yang kekuatan ekonominya setara dengan Jepang akan menambah saingan Jepang itu sendiri. Pada tahun 2000-an Cina muncul sebagai salah satu kekuatan baru di Asia Tenggara. Kemunculan Cina pada dasarnya bermaksud untuk memperdalam hubungan ekonomi dengan Asia Tenggara, termasuk dengan Indonesia. Cina meningkatkan intensitas diplomasinya di ASEAN. Langkah Cina untuk memelopori *China-ASEAN Free Trade Agreements (CAFTA)* yang diresmikan sejak November 2001 menandai semakin intensifnya upaya Cina untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan ASEAN. Cina mulai mengemuka semasa Krisis Asia, setelah Cina konsisten tidak mendevaluasi mata uangnya dan memberikan bantuan 4 milyar dollar AS melalui IMF (*International Monetary Fund*) dan jalur bilateral. Survey Kementerian Luar Negeri Jepang di enam negara ASEAN pada tahun 2008 menghasilkan kesimpulan, pengaruh Cina di Asia Tenggara telah melampaui Jepang (*Japan International Cooperation Agency*, 2009). Oleh karena adanya kekuatan besar yang baru tersebut, Jepang membuat model kebijakan untuk menarik negara-negara di ASEAN (Koppel & Orr Jr, 1993).

Jepang pada dasarnya membuat dua jalur pendekatan untuk mendekati negara-negara ASEAN pada bidang ekonomi. Jalur pertama yang menjadi alternatif pendekatan Jepang adalah ASEAN yaitu kerjasama regional yang dikenal dengan nama *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP)* dan EPA (*Economic Partnership Agreement*) sebagai kerjasama bilateral, seperti halnya Jepang menjalin IJ-EPA dengan Indonesia. Bagi Jepang, Indonesia dipandang sebagai ujung tombak ASEAN, yang dipercaya menjadi kunci bagi terciptanya stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara. IJ-EPA merupakan bagian dari formula kebijakan pemerintahan Jepang. Negara tersebut membuat sebuah model kerjasama seperti demikian dikarenakan untuk menjaga dominasi Jepang di Asia Tenggara. Doktrin Fukuda telah dianggap sebagai titik balik utama dalam hubungan pasca perang Jepang dengan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN sangat penting bagi Jepang karena merupakan sumber energi utama dan bahan baku penting lainnya: 98% kebutuhan impor karet alam, 96% dari timahnya, 40% dari tembaga dan bauksitnya berasal dari Kawasan Asia Tenggara (Kratoska, 2011). Kepentingan-kepentingan akan sumber daya alam ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik Jepang, tetapi juga mengenai peran kepemimpinan politik di wilayah tersebut yang berusaha dicari oleh Jepang. Diplomasi Jepang di Asia Tenggara secara eksplisit disebut sebagai kontribusi Jepang terhadap tatanan internasional (Kratoska, 2011).

Jepang optimis untuk melebarkan peran kepemimpinan politiknya di ASEAN. Jepang memang negara maju yang tidak kaya akan sumber daya alam, namun canggihnya teknologi dan unggulnya sumber daya manusia yang dimiliki membuatnya mudah untuk menggaet negara-negara tetangga di Asia Tenggara untuk melengkapinya. Indonesia adalah negara yang menjadi incaran utamanya karena Indonesia adalah kekuatan utama di Asia Tenggara. Dengan populasi 259 juta orang, negara ini menyumbang sekitar 41% dari total populasi Asia Tenggara yang berjumlah 635 juta orang. Pada tahun 2016 PDB-nya mencapai US\$ 932 milyar, atau 39% dari PDB Asia Tenggara (Shiraishi, 2018). Adanya IJ-EPA membuka peluang pangsa pasar yang besar bagi Jepang sehingga mendapatkan akses kemudahan dalam meningkatkan ekspor ke Indonesia. Pasalnya, dalam perjanjian kerjasama IJ-EPA ini, Indonesia sepakat membuka 92,5% dari total 11.163 pos tarifnya (Kementerian Perdagangan RI, 2015)

Dalam menjalankan strategi IJ-EPA-nya, Jepang berpatokan pada dua pertimbangan utamanya, yaitu kesesuaian EPA dengan kesepakatan WTO (*World Trade Organisation*) dan

dampak IJ-EPA terhadap kepentingan domestik (Mangowal, 2010). Kerangka kerjasama IJ-EPA selalu ditopang oleh ODA dalam memilih sektor industri dan proyek integrasi, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kepentingan yang diinginkan Jepang tidak hanya kepentingan liberalisasi perekonomiannya saja, namun juga mengikat dan memperlambat hubungan yang berlangsung dengan mitra kerjasamanya baik secara bilateral dengan Indonesia, maupun multilateral dengan ASEAN. IJ-EPA merupakan cara Jepang untuk menanamkan citra baik Jepang di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang stabil dan merupakan negara inti di ASEAN, diharapkan Jepang untuk membantu menjaga eksistensi Jepang untuk mendominasi kawasan Asia Tenggara.

Hal tersebut dibuktikan dengan usaha gencar yang dilakukan Jepang untuk tetap bisa memimpin perlombaan infrastruktur Asia Tenggara melawan Cina, dengan proyek-proyek yang bernilai hampir satu setengah kali lipat dari saingannya (Cina). Proyek-proyek yang didukung Jepang ada di enam negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ini — Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam — senilai US\$ 597 milyar, sedangkan Cina berada di angka US\$ 310 milyar (Bloomberg, 2019). Angka-angka tersebut menggarisbawahi maraknya kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur di Asia Tenggara, serta dominasi Jepang atas Cina di wilayah tersebut. Jepang menjanjikan akan membantu memperkuat solidaritas antara negara-negara anggota ASEAN sambil menumbuhkan saling pengertian antara mereka dan negara-negara Indo-Cina (Kratoska, 2011). Strategi ekonomi Jepang yang baru telah mendorong pembangunan ekonomi regional ASEAN, yang digunakan Jepang untuk membangun kepemimpinan atas ekonomi yang dinamis di Kawasan tersebut.

Pendekatan Jepang ke Indonesia melalui kerjasama ekonomi IJ-EPA ini pada dasarnya tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan ekonomi di Indonesia saja, tapi juga untuk kepentingan politiknya di Kawasan Asia Tenggara. Adanya kebangkitan Cina, telah menyadarkan Jepang bahwa negara tersebut kini memiliki pesaing baru yang berpotensi menggeser dominasinya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia yang dianggap sebagai kunci di Asia Tenggara, memegang peranan penting untuk dijadikan mitra utama Jepang agar dominasi di Asia Tenggara tetap dipegang oleh Jepang.

#### *Upaya Meredam Gejolak Kawasan Akibat Revisi Pasal 9 Konstitusi Pasifis*

Ketika kerjasama IJ-EPA mulai diberlakukan pada tahun 2008, di tahun yang sama, domestik Jepang juga sedang disibukkan dengan perencanaan PM Shinzo Abe yang dengan ambisinya akan melakukan revisi pasal 9 Konstitusi Pasifis. Isi pasal tersebut berkaitan dengan perjanjian damai, yaitu pelarangan Jepang untuk memiliki kekuatan militer sejak pasca Perang Dunia II (Auer, 1990). Namun kini Jepang melakukan reinterpretasi Pasal 9 Konstitusi Pasifis ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas militernya akibat kekhawatiran Jepang terhadap kebangkitan militer Cina. Hal ini membuat Jepang secara tidak langsung harus semakin melakukan antisipasi jika ada serangan mendadak dari pihak asing — terutama Cina yang sedang berkonflik dengan Jepang terkait pulau Senkaku — yang serangannya bisa terjadi sewaktu-waktu (Kimijima, 2009).

Reinterpretasi Pasal 9 untuk peningkatan kapabilitas militer tersebut memberikan pengaruh ketegangan bagi kawasan Asia Pasifik. Pasalnya pada masa Perang Dunia II Jepang adalah satu-satunya negara Asia yang pernah menjajah negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Maka Jepang butuh meyakinkan negara-negara tetangga di Kawasan tersebut agar bisa memenangkan kepercayaan mereka bahwa militerisme tidak akan terjadi

meskipun Jepang melakukan revisi pasal 9 Konstitusi Pasifis-nya (Tatsumi, 2017). Konstitusi Pasifis Jepang adalah masalah internasional, bukan hanya domestik (Kimijima, 2006). Revisi Pasal 9 dapat menjadi masalah politik, apabila para pemimpin di negara-negara tersebut tidak percaya bahwa dengan adanya perubahan status militernya Jepang tetap akan menjaga perdamaian, tidak akan agresif, maupun menimbulkan ancaman bagi stabilitas Kawasan (Hornung, 2018).

Berkat kerja sama citra positif yang telah Jepang dapatkan dari Indonesia, kini Indonesia menjadi salah satu negara mitranya yang bereaksi positif terhadap rencana revisi Pasal 9 yang akan dilakukan Jepang tersebut. Presiden Joko Widodo optimis, bahwa Indonesia yang letak geografisnya strategis itu bisa menjadi penyeimbang kawasan Asia Timur, yang kondisinya seperti diketahui sering diwarnai berbagai persoalan, seperti konflik perbatasan Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Presiden Indonesia tersebut menaruh harapan agar stabilitas kawasan Asia Timur tetap terjaga. Baginya, jika terwujud stabilitas kawasan Asia Timur maka akan memacu pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara (Waluyo, 2015).

Dalam kesempatan wawancara yang dilakukan oleh Ilham Malik kepada presiden Joko Widodo pada tahun 2014, saat itu beliau menyampaikan bahwa, "*Harus diakui hingga saat ini Jepang telah memberikan begitu banyak bantuan berbiaya murah, dan ini sangat baik bagi Indonesia untuk tidak terlalu berat menanggung utang. Sehingga wajar jika nanti Jepang membutuhkan dukungan Indonesia dalam menerapkan kebijakannya internasionalnya, terutama yang bersinggungan dengan Indonesia dan ASEAN*" (Malik, 2014). Bantuan yang diberikan Jepang ke Indonesia selama ini mendapatkan respon positif dari pemimpin Indonesia tersebut, sehingga citra baik Jepang dalam membantu negaranya digunakan untuk mendukung Jepang dalam pembuatan kebijakannya. Indonesia sebagai negara dengan populasi yang mewakili 40% dari seluruh ASEAN, memiliki kunci penting tersebut untuk mempromosikan stabilitas ekonomi dan politik di mata dunia internasional.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan bukti dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan ODA Jepang yang awalnya untuk membantu perbaikan ganti rugi perang, hal tersebut kemudian juga dimanfaatkan Jepang untuk menjaga hubungan baik dengan Indonesia. ODA digunakan sebagai alat untuk memelihara hubungan baik Jepang dengan Indonesia selama kurang lebih 50 tahun (1958-2008). Bantuan ODA tersebut akhirnya mengantarkan Jepang dan Indonesia menjalin kerjasama bilateral resmi melalui skema IJ-EPA yang berhasil membangun citra baik Jepang di Indonesia.

Jepang menjalin kerjasama IJ-EPA dengan Indonesia karena Indonesia merupakan kunci ASEAN, dan stabilitas domestik Indonesia bisa mempengaruhi Kawasan tersebut. Ketika Jepang membangun Indonesia, maka secara tidak langsung membangun ASEAN. Maka kerjasama Jepang dengan Indonesia dimaksudkan untuk menjaga dominasi Jepang di Asia Tenggara. Selain itu, Jepang membutuhkan kepercayaan dari negara-negara Asia Tenggara terkait rencana revisi Pasal 9 Konstitusi Pasifis-nya yang akan dilakukan oleh PM Shinzo Abe. Jepang yang telah mendapatkan citra positif dari Indonesia membuat Jepang mendapatkan reaksi positif dari negara tersebut dalam rencana revisi Konstitusi-nya. Namun beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura dan Malaysia, menentang rencana Jepang tersebut. Maka dari itu, dengan adanya kerjasama Jepang dengan Indonesia melalui skema IJ-EPA ini Jepang menginginkan agar Indonesia yang notabene sebagai kunci ASEAN atau *icon* Asia Tenggara ini, bisa memengaruhi negara-negara lainnya agar mereka percaya

terhadap Jepang, dan bereaksi positif pula terhadap rencana perubahan pasal 9 Konsitusi Pasifis yang akan dilakukan oleh Jepang.

## REFERENSI

- Arase, David. 1995. *Buying Power: The Political Economy of Japan's Foreign Aid*. Colorado: Lynne Rienner Publisher Inc.
- Goto, Ken'ichi. 1997. *Returning to Asia: Japan-Indonesia Relations*. Tokyo: Ryukei Shyosha
- Holsti, Kalevi J. 1996. *The State, War, and the State of War*. Cambridge: Cambridge University Press
- Auer, James, 1990. 'Law and Contemporary Problem: Article Nine of Japan's Constitution', vol. 53, no. 2, pp. 171-178.
- Beeson, Mark. 2001. 'Japan and Southeast Asia', dilihat 3 Juli 2019, <[https://espace.library.uq.edu.au/data/UQ\\_10797/mb\\_quasi.pdf](https://espace.library.uq.edu.au/data/UQ_10797/mb_quasi.pdf)>
- Jurnal Hukum Internasional Indonesia. 2008. 'Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)', dilihat 21 September 2018, <[file:///C:/Users/A450/Downloads/480-476-1-PB%20\(6\).pdf](file:///C:/Users/A450/Downloads/480-476-1-PB%20(6).pdf)>
- Kementerian Keuangan Indonesia. 2014. 'Analisis Dampak IJEPA terhadap Indonesia dan Jepang', dilihat 21 September 2018, <[https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014\\_kajian\\_pkrb\\_03.%20dampak%20ijepa.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20dampak%20ijepa.pdf)>
- Kimijima, Akihiko. 2006. 'Revisiting the Pacifism of the Japanese Constitution', dilihat 28 Mei 2019, <<http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/vol18-3/KIMIJIMA.pdf>>
- 2009. 'Japan Contribution to Global Constitutionalism', dilihat 28 Mei 2019, <<https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1129&context=swb>>
- Koppel, B. & Orr Jr, R. 1993. *Japan's Foreign Aid: Power and Policy in New Era*. Boulder: Westview Press
- Kratoska, Paul H. 2011. 'Journal of Southeast Asian Studies', vol. 29, no. 01, pp. 199 – 201.
- Mangowal, Stella E. 2010. 'Jenesys dan Citra Jepang di Indonesia', dilihat 28 Juni 2019, <<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/135761-T%2028001-Soft%20power-Analisis.pdf>>
- Bloomberg, 2019. 'Japan Still Leads in Shoutheast Asia infrastructure Race, even as China Ramps up Belt and Road Investments: Report', dilihat 4 Juli 2019, <<https://www.scmp.com/author/bloomberg-0>>
- Fitriyanti, Azizah. 2018. 'Mendalami Hubungan Jepang-Indonesia Melalui Alih Teknologi', dilihat 30 Juni 2019, <<https://www.antaraneews.com/berita/781122/mendalami-hubungan-jepang-indonesia-melalui-alih-teknologi>>

- Hornung, J. 2018. 'Revising Japans Peace Constitution Much Ado About Nothing', dilihat 28 Juni 2019, <<https://warontherocks.com/2018/03/revising-japans-peace-constitution-much-ado-about-nothing/>>
- Japan International Cooperation Agency, 2009. 'Diplomacy and development', dilihat 10 Mei 2019, <<http://www.africa-asia-confidential.com/>>
- Kementerian Perdagangan RI, 2015. 'Neraca Perdagangan Indonesia dengan Jepang', 12 April 2019, <<https://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=111>>
- Kementerian Perindustrian RI, 2013. 'IJEPA Tak Berikan Manfaat Signifikan bagi Indonesia', dilihat 22 September 2018, <<http://www.kemenperin.go.id/artikel/8198/IJEPA-Tak-Berikan-Manfaat-Signifikan-bagi-Indonesia>>
- Malik, Ilham. 2014. 'Kunjungan Abe Ingatkan Kontribusi Jepang untuk RI', dilihat 25 Juni 2019, <<https://republika.co.id/berita/koran/pro-kontra/ojv4w62/ib-ilham-malik-peneliti-center-for-urban-and-regional-studies-ubl-kunjungan-abe-ingatkan-kontribusi-jepang-untuk-ri>>
- Kementerian Perdagangan RI, 2007. 'Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) and Its Effects on Indonesian and Japanese Economy', dilihat 30 Juni 2019, <<https://www.indonesia-investments.com/upload/documents/Indonesia-Japan-Economic-Partnership-Agreement-IJEPA-Indonesia-Investments.pdf>>
- MOFA, 2003. 'The Revision of the ODA Charter and Japan's New Approach', dilihat 23 Juni 2019 <[https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2003/part1\\_1\\_4.html#sect4](https://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2003/part1_1_4.html#sect4)>
- Ryantori, 2014. 'Motif di Balik Bantuan Jepang untuk Palestina dalam Kerangka CEAPAD', dilihat 25 Juni 2019, <<https://media.neliti.com/media/publications/80621-ID-motif-di-balik-bantuan-jepang-untuk-pale.pdf>>
- Shiraishi, Takashi. 2018. 'Global perspective: Indonesia, Japan can work together to drive Indo-Pacific initiative', dilihat 02 Juli 2019, <<https://mainichi.jp/english/articles/20181213/p2a/00m/0na/004000c>>
- Simorangkir Eduardo, 2018. 'Deretan Proyek Infrastruktur RI yang Libatkan Jepang', dilihat 11 Agustus 2019, <<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3887113/ini-deretan-proyek-infrastruktur-ri-yang-libatkan-jepang/4>>
- Sneider, Daniel. 1989. 'How Japan Became Dominant Player in Southeast Asia' dilihat 3 Juli 2019, <[https://www.csmonitor.com/1989/1113/oasia2.htmla\\*an](https://www.csmonitor.com/1989/1113/oasia2.htmla*an)>
- Tatsumi, Yuki. 2017. 'The Abe's New Vision for Japan's Constitution', dilihat 17 Juni 2019, <<https://thediplomat.com/2017/05/abes-new-vision-for-japans-constitution/>>
- Tribun News, 2018. 'Pembangunan Infrastruktur Indonesia-Jepang Tingkatkan Kemampuan Tenaga ahli konstruksi Indonesia', dilihat 10 Agustus 2019, <<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/15/pembangunan-infrastruktur-indonesia-jepang-tingkatkan-kemampuan-tenaga-ahli-konstruksi-indonesia>>
- Waluyo, Andy lala. 2015. 'Jokowi: Indonesia Bisa Jadi Penyeimbang Asia Timur', dilihat 17 Juni 2019, <<https://www.voaindonesia.com/a/jokowi-dorong-stabilitas-asia-timur-/2737298.html>>